

Optimalisasi Fungsi Treasury Daerah Dalam Menjaga Likuiditas dan Kualitas Belanja APBD di Pemerintah Daerah DI DIY

Devi Kusumawardhani¹, Tasya Febiana Putri Rahayu²

¹UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA

²UNIVERSITAS MAHAKARYA ASIA

E-mail: devi.dpr2021@gmail.com

Article History:

Received: 10 Juni 2026

Revised: 29 Juni 2026

Accepted: 03 Juli 2026

Keywords: *treasury daerah; praktik keseharian; kualitas belanja; APBD; etnometodologi, SEM-PLS.*

Abstract: *Penelitian ini dilandasi oleh urgensi fungsi treasury daerah dalam menjaga likuiditas dan meningkatkan kualitas belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuannya untuk menganalisis pengaruh optimalisasi fungsi treasury (X1) dan manajemen kas (X2) terhadap likuiditas daerah (Y1), serta implikasinya terhadap kualitas belanja APBD (Y2) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan adalah mixed methods dengan desain explanatory sequential, diawali dengan survei kuantitatif terhadap 60 responden melalui purposive sampling dan dianalisis menggunakan SEM-PLS, kemudian diperdalam melalui pendekatan etnometodologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi fungsi treasury dan manajemen kas berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas daerah. Likuiditas daerah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas belanja APBD. Kedua variabel tersebut tidak berpengaruh langsung secara signifikan terhadap kualitas belanja, sehingga likuiditas berperan sebagai variabel mediasi utama. Temuan kualitatif mengungkap pengelolaan likuiditas tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh praktik sosial aparatur melalui penyesuaian situasional, refleksi kondisi kas, dan penggunaan pengetahuan praktis. Sehingga kualitas belanja APBD ditentukan oleh kemampuan menjaga likuiditas secara optimal melalui integrasi sistem dan praktik adaptif dalam organisasi.*

PENDAHULUAN

Konteks keterlibatan Badan Pengelola Keuangan Aset (BPKA) pada isu likuiditas nyata masyarakat, nampak saat TP2DD DIY menggelar di Yogyakarta bertema Sinergi Digitalisasi Transaksi Keuangan Desa untuk Kemandirian Daerah. Inisiatif tersebut ditandai peluncuran aplikasi DIGDAYA, terintegrasi dengan sistem keuangan desa yang telah tercatat dengan memproses transaksi lebih dari Rp15,23 miliar di 305 desa sepanjang tahun 2024. Digitalisasi

QRIS dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD/KKI) didukung Bank Indonesia maupun Bank BPD DIY guna memperkuat efisiensi maupun transparansi pengelolaan keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta (BPKA DIY, 2025).

Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DIY mengapresiasi koordinasi dengan BPKA DIY untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (GFS) dimuat di Antara Jogja (2025) . Menurut DJPB Kementerian Keuangan RI, program ini menunjukkan keterlibatan BPKA DIY dalam pelaporan dan akuntabilitas keuangan berdasarkan standar nasional diurai di Kanwil DJPb DIY (2025). Literatur keuangan publik Halim & Kusufi (2020) menegaskan bahwa kegagalan pengelolaan kas, dapat menyebabkan idle cash atau keterlambatan belanja, yang berdampak langsung pada kualitas layanan publik.

Pengelolaan keuangan daerah menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara ketersediaan kas (likuiditas) dan kualitas realisasi belanja. Fenomena penumpukan belanja di akhir tahun dan keterlambatan pembayaran mencerminkan lemahnya fungsi treasury dan manajemen kas. Secara teoretis, fungsi treasury berperan dalam pengendalian arus kas, proyeksi kas, serta optimalisasi penggunaan dana. Namun, keterkaitan mekanisme tersebut terhadap kualitas belanja melalui jalur likuiditas masih memerlukan pembuktian empiris. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menguji peran likuiditas sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara optimalisasi fungsi treasury, manajemen kas, dan kualitas belanja APBD.

Halim & Kusufi (2020) menjabarkan bahwa manajemen keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pengendalian kas, berfaedah untuk menjamin kesinambungan fiskal daerah. Treasury daerah mempunyai tanggungjawab atas perencanaan kas, pengendalian arus kas, juga optimalisasi penggunaan dana daerah (Mahmudi, 2019) . Fungsi tersebut menentukan kelancaran belanja dan stabilitas likuiditas. Likuiditas daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Cerminan likuiditas yang baik Nampak pada perencanaan kas efektif dan sinkronisasi belanja optimal. Kualitas belanja APBD terbukti dari tingkat serapan anggaran, ketepatan waktu, efisiensi, dan manfaat belanja bagi masyarakat (Mardiasmo, 2018).

Syahrudin (2026) mengungkapkan penemuan dari strategi manajemen kas daerah dalam menjaga likuiditas APBD (2026) bahwa likuiditas APBD dipengaruhi mismatch penerimaan maupun belanja, Strategi treasurynya dengan pengendalian SPD, prioritas pembayaran, penjadwalan ulang. Terbukti menjaga kas tetap aman Indonesian Treasury Review (Kemenkeu) Putra & Shauki (2022) mengutarakan banyak kas daerah menyimpan kas berlebih (*idle cash*), pengelolaan kas memengaruhi efektivitas belanja dan terdapat banyak hambatan institusional dalam percepatan penyaluran kas. Indonesian Treasury Review menyatakan keterlambatan APBD berdampak negatif pada layanan publik serta menunjukkan pentingnya tata kelola keuangan daerah. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi mengemukakan kinerja APBD diukur dari efektivitas, efisiensi, dan struktur belanja serta menunjukkan pentingnya pengelolaan fiskal daerah

Dalam konteks Pemerintah Daerah DIY, pengelolaan kas tidak hanya bersifat administratif bahkan bersifat strategis yang dipengaruhi oleh pola pendapatan daerah, transfer pusat, serta karakteristik belanja OPD. Pengelolaan kas daerah akan optimal jika mencakup aspek perencanaan kas, pelaksanaan kas, dan pengendalian kas yang berpengaruh pada tingkat likuiditas daerah, efisiensi penggunaan anggaran, serta kualitas realisasi APBD. Dalam konteks Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKA DIY) berperan sebagai pusat pengelolaan kas, penatausahaan anggaran, serta penjaga stabilitas arus kas APBD.

Penelitian tentang keuangan daerah lebih banyak menilai kinerja APBD dari sisi serapan anggaran, bukan dari manajemen likuiditas kas daerah. Kajian kas daerah umumnya berhenti pada isu *idle cash*, tanpa menganalisis fungsi treasury daerah secara institusional (peran BPKA/BPKAD). Belum banyak penelitian yang mengaitkan fungsi treasury tentang kualitas belanja APBD, padahal kualitas belanja adalah indikator kinerja keuangan modern. DIY memiliki karakteristik fiskal khusus (keistimewaan, pola transfer, struktur belanja budaya & pariwisata) yang belum banyak dijadikan objek kajian treasury daerah. Peran BPKA DIY masih sering dipersepsikan administratif, belum dikaji sebagai treasury manager strategis. Penelitian-penelitian terdahulu, lebih banyak menggunakan pendekatan kuantitatif dan belum menggali bagaimana fungsi treasury dijalankan dalam praktik sehari-hari.

Penelitian ini menggunakan mixed methods dengan desain *explanatory sequential*. Paradigma interpretif dengan pendekatan kualitatif etnometodologi juga untuk mengetahui mengapa dan bagaimana fungsi treasury daerah tidak dipahami semata-mata sebagai sistem teknis pengelolaan kas, tetapi sebagai praktik sosial yang dijalankan oleh aparatur BPKA DIY dalam merespons dinamika likuiditas dan kualitas belanja APBD. Garfinkel (1967) menjelaskan bahwa realitas organisasi dibentuk melalui praktik sehari-hari aktor yang sering kali bersifat tidak tertulis namun menjadi pedoman tindakan.

Pendekatan etnometodologi ini diterapkan untuk memahami bagaimana aparatur BPKA DIY membangun keteraturan kerja treasury melalui tindakan rutin, interpretasi terhadap regulasi, serta penyesuaian situasional dalam pengelolaan kas daerah. Mengungkap bagaimana aparatur BPKA DIY secara praktis menjaga likuiditas kas dan kualitas belanja APBD melalui tindakan rutin, pengambilan keputusan situasional, serta interpretasi terhadap aturan formal. Dengan paradigma ini, peneliti berupaya memahami “bagaimana” fungsi treasury dijalankan, bukan sekadar “apa hasilnya”.

Peneliti merumuskan permasalahan penelitian ini “Bagaimana menganalisis pengaruh optimalisasi fungsi treasury (X1) dan manajemen kas (X2) terhadap likuiditas daerah (Y1), serta implikasinya terhadap kualitas belanja APBD (Y2) “. Praktik fungsi treasury dijalankan dalam aktivitas keseharian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta serta kontribusinya terhadap optimalisasi belanja daerah. Dengan tujuan dapat menganalisis pengaruh optimalisasi fungsi treasury (X1) dan manajemen kas (X2) terhadap likuiditas daerah (Y1), serta implikasinya terhadap kualitas belanja APBD (Y2). Manfaatnya memperkaya kajian akuntansi sektor publik dengan pendekatan kuantitatif dan etnometodologi dalam studi treasury daerah serta memberikan rekomendasi berbasis praktik kerja nyata untuk penguat fungsi treasury BPKA.

LANDASAN TEORI

Cabang ilmu Keuangan publik mempelajari pengelolaan pemerintah akan penerimaan dan pengeluaran untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Mardiasmo (2018) menjelaskan pengelolaan keuangan sektor publik harus memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas. Konteks pemerintah daerah, pengelolaan keuangan mengelola penyerapan anggaran serta kualitas belanja yang bermanfaat nyata bagi masyarakat. Halim & Kusufi (2020) mengungkapkan bahwa manajemen keuangan daerah meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengendalian keuangan daerah. Proses ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan fiskal juga meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Dalam Isi Pokok Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2019)

1. Mengatur siklus keuangan daerah secara menyeluruh: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
2. Menegaskan peran: BUD (Bendahara Umum Daerah) dan Kuasa BUD
3. Mengatur:
 - a. Pengelolaan Kas Daerah
 - b. Penggunaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)
 - c. Mekanisme penerimaan dan pengeluaran kas
 - d. Penempatan kas sementara (*idle cash*)

4. Menekankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Dalam PP 12/2019 adalah fondasi hukum utama treasury daerah, sebagai berikut:

1. Menjadi dasar kewenangan BUD dalam manajemen kas daerah
2. Mengatur arus kas masuk dan keluar RKUD
3. Menjadi payung bagi kebijakan cash management, termasuk:
 - a. Pengendalian saldo kas
 - b. Penjadwalan pembayaran
 - c. Optimalisasi kas menganggur

Tanpa PP ini, fungsi treasury daerah tidak memiliki legitimasi struktural.

Isi Pokok (teknis treasury) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (2020) sebagai berikut:

1. Merupakan aturan Sturunan operasional dari PP 12/2019.
2. Mengatur secara rinci:
 - a. Tata cara pelaksanaan anggaran
 - b. Mekanisme SP2D
 - c. Penatausahaan oleh PPKD/BUD
 - d. Pengelolaan kas, bank, dan RKUD
3. Mengatur detail:
 - a. Rekening operasional
 - b. Rekonsiliasi kas
 - c. Pengendalian internal perbendaharaan

Permendagri 77/2020 adalah manual kerja treasury daerah, karena:

1. Menjadi pedoman teknis harian bagi:
 - a. Bidang Perbendaharaan BPKA/BPKAD
 - b. Bendahara penerimaan dan pengeluaran
2. Menjamin:
 - a. Ketertiban kas
 - b. Keseragaman praktik treasury antar daerah
3. Menjadi acuan utama pemeriksaan BPK terkait pengelolaan kas dan RKUD

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.07/2020 Tentang Koordinasi Penyelarasan Langkah-Langkah Kebijakan Keuangan Daerah (2020) dan regulasi turunannya

1. Mengatur hubungan keuangan Pemerintah Pusat Daerah terkait:
 - a. Penyaluran Transfer ke Daerah
 - b. Penempatan dan penggunaan RKUD
2. Mengatur:

- a. Penyaluran dana ke RKUD berbasis kinerja dan kas
 - b. Pemanfaatan saldo kas daerah
 - c. Integrasi RKUD dengan sistem perbendaharaan negara (SPAN)
3. Mendorong:
- a. Cash pooling
 - b. Pengurangan idle cash
 - c. Transparansi saldo RKUD

Relevansi PMK tersebut diatas dengan Treasury Daerah karena:

- 1. RKUD adalah titik temu treasury pusat dan daerah
- 2. Treasury daerah wajib:
 - a. Menjaga saldo RKUD sesuai ketentuan
 - b. Menyelaraskan manajemen kas dengan kebijakan fiskal nasional
- 3. Menjadi dasar:
 - a. Pengendalian penyaluran transfer
 - b. Penilaian kesehatan pengelolaan kas daerah

Pengelolaan keuangan publik merupakan proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan negara/daerah secara transparan dan akuntabel. Dalam kerangka New Public Management (NPM), pengelolaan keuangan publik tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada kinerja, efisiensi, dan efektivitas penggunaan anggaran. Oleh karena itu, kualitas pengelolaan keuangan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan secara optimal. Teori New Public Management (NPM) dikemukakan oleh Hood (1991) dan selanjutnya dalam buku *Public Management and Administration* oleh Hughes (2012). NPM menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, dan orientasi kinerja dalam pengelolaan sektor publik. Dalam konteks penelitian ini, teori NPM digunakan untuk menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah, termasuk fungsi treasury dan manajemen kas, harus diarahkan pada peningkatan kinerja anggaran, khususnya kualitas belanja APBD.

Dalam konteks ini, fungsi treasury menjadi bagian penting karena berperan dalam memastikan ketersediaan kas, mengendalikan arus kas, serta menjamin kelancaran pelaksanaan program pemerintah. Tanpa pengelolaan kas yang baik, kebijakan anggaran yang telah direncanakan tidak dapat diimplementasikan secara optimal. Menurut Mardiasmo (2018) dalam buku *Akuntansi Sektor Publik*, pengelolaan keuangan daerah mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Dalam teori ini, fungsi treasury merupakan bagian dari tahap pelaksanaan yang berperan dalam mengelola kas daerah agar tetap likuid. Teori ini menjadi dasar dalam menjelaskan hubungan antara fungsi treasury, manajemen kas, dan likuiditas daerah.

Fungsi treasury daerah merujuk pada aktivitas pengelolaan kas pemerintah daerah yang mencakup perencanaan kas, pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran, serta pengendalian likuiditas. Fungsi ini dijalankan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang bertanggung jawab atas pengelolaan kas daerah secara keseluruhan. Fungsi treasury memiliki tiga peran utama, yaitu:

- 1. Cash planning, yaitu perencanaan arus kas untuk memastikan ketersediaan dana.
- 2. Cash execution, yaitu pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas.
- 3. Cash control, yaitu pengendalian kas untuk menjaga stabilitas likuiditas.

Optimalisasi fungsi treasury sangat penting untuk menghindari ketidaksesuaian antara penerimaan dan pengeluaran (*cash mismatch*). Apabila fungsi ini tidak berjalan optimal, maka akan terjadi keterlambatan pembayaran, penumpukan kas, atau bahkan defisit kas yang

berdampak pada terganggunya pelaksanaan program pemerintah.

Manajemen kas daerah merupakan bagian dari fungsi treasury yang berfokus pada pengelolaan arus kas masuk dan keluar secara efektif dan efisien. Tujuan utama manajemen kas adalah menjaga keseimbangan antara likuiditas dan efisiensi penggunaan dana. Teori manajemen kas dijelaskan oleh Brigham & Houston (2019) dalam buku *Fundamentals of Financial Management*, yang menyatakan bahwa tujuan utama manajemen kas adalah menjaga keseimbangan antara likuiditas dan profitabilitas. Dalam sektor publik, konsep ini diadaptasi menjadi keseimbangan antara ketersediaan kas dan optimalisasi penggunaan anggaran. Teori ini digunakan untuk menjelaskan pentingnya pengelolaan kas dalam menjaga likuiditas daerah.

Menurut Kieso et al. (2018), likuiditas merupakan indikator penting dalam menilai kesehatan keuangan suatu organisasi. Dalam sektor publik, likuiditas yang baik ditunjukkan oleh adanya perencanaan kas yang akurat, sinkronisasi antara penerimaan dan pengeluaran, serta minimnya keterlambatan pembayaran. Menurut Van Horne & Wachowicz (2013) dalam buku *Fundamentals of Financial Management*, likuiditas merupakan kemampuan organisasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Dalam konteks pemerintah daerah, likuiditas mencerminkan kemampuan dalam membiayai kegiatan operasional dan belanja daerah secara tepat waktu. Teori ini menjadi dasar dalam menjelaskan peran likuiditas sebagai variabel mediasi dalam penelitian. Penelitian Indonesian Treasury Review Putra & Shauki (2022) menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah mengalami permasalahan likuiditas akibat ketidaksesuaian waktu antara penerimaan dan pengeluaran. Hal ini menegaskan pentingnya pengelolaan kas dan treasury dalam menjaga stabilitas likuiditas daerah.

Kualitas belanja publik dijelaskan oleh Allen & Tommasi (2001) dalam buku *Managing Public Expenditure*, yang menyatakan bahwa belanja publik yang berkualitas harus memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menjelaskan bahwa kualitas belanja APBD tidak hanya dilihat dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari dampaknya terhadap pelayanan publik.

Putra & Shauki (2022) menunjukkan bahwa pemerintah daerah sering menghadapi fenomena *idle cash*, yaitu kas menganggur yang tidak segera dimanfaatkan untuk belanja publik. Kondisi ini mencerminkan lemahnya manajemen kas yang berdampak pada rendahnya kualitas belanja daerah. Selain itu, Syaharuddin (2026) menegaskan bahwa strategi pengelolaan kas seperti penjadwalan pembayaran, pengendalian arus kas, dan prioritas belanja dapat meningkatkan stabilitas likuiditas daerah.

Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa belanja publik yang berkualitas adalah belanja yang mampu memberikan outcome dan impact yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif modern, kualitas belanja juga berkaitan dengan value for money, yaitu bagaimana pemerintah mampu mengelola anggaran secara ekonomis, efisien, dan efektif. Oleh karena itu, kualitas belanja sangat dipengaruhi oleh perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik, termasuk pengelolaan likuiditas daerah. Syaharuddin (2026) menemukan bahwa strategi pengelolaan kas seperti pengendalian SPD, prioritas pembayaran, dan penjadwalan ulang belanja mampu menjaga likuiditas APBD tetap stabil. Hal ini menunjukkan bahwa likuiditas berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara fungsi treasury, manajemen kas, dan kualitas belanja.

Akuntansi sektor public merupakan suatu ilmu tentang sistem informasi keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan akuntabilitas, transparansi, dan pengambilan keputusan dalam organisasi publik. Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa akuntansi sektor publik tidak hanya berorientasi pada pencatatan keuangan, tetapi juga pada pertanggungjawaban pengelolaan

sumber daya publik kepada masyarakat. Dalam konteks pemerintah daerah, akuntansi sektor publik menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa pengelolaan APBD dilaksanakan secara efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Kajian akuntansi sektor publik kontemporer memandang akuntansi sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh konteks budaya, regulasi, dan interaksi aktor.

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan kritis dan interpretif dalam akuntansi yang menolak anggapan bahwa akuntansi bersifat netral dan teknis semata. Kamayanti (2016) merumuskan bahwa praktik akuntansi di sektor publik dibentuk oleh nilai, makna, dan kepentingan aktor yang terlibat di dalamnya. Aparatur menjalankan aturan formal, juga interpretasi terhadap regulasi, menyesuaikan praktik dengan kondisi lapangan, serta membangun pemaknaan kolektif mengenai likuiditas dan kualitas belanja. Oleh karena itu, pemahaman treasury daerah membutuhkan pendekatan yang mampu menangkap praktik keseharian dan logika kerja aparatur.

Menurut Nordiawan & Hertianti (2019) dalam buku *Akuntansi Sektor Publik*, kinerja keuangan daerah menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD yang seharusnya ekonomis, efisien, dan efektif. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar* mengutip Bastian (2020) bahwa kinerja keuangan dilihat dari kemampuan menyerap anggaran, kualitas belanja dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

Treasury daerah (perbendaharaan daerah) bagian inti dari sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah. Kutipan Halim & Kusufi (2020) bahwa fungsi perbendaharaan mencakup pengelolaan kas, pengendalian arus masuk, arus keluar kas, serta penjaminan ketersediaan dana pendukung pelaksanaan program pemerintah daerah. *Treasury* daerah berperan menjaga likuiditas agar kewajiban pemerintah daerah dapat dipenuhi tepat waktu tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah. Perspektif akuntansi sektor publik modern merujuk pada *treasury* fungsi administratif sekaligus fungsi strategis yang berkontribusi langsung terhadap kualitas belanja daerah. Mahmudi (2019) menjabarkan bahwa kualitas belanja publik tercermin dari ketepatan waktu, ketepatan sasaran, dan manfaat belanja bagi masyarakat.

Kerangka konseptual *International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB)* menyebutkan pengelolaan likuiditas sektor publik harus mempertimbangkan karakteristik pendapatan daerah yang fluktuatif serta pola belanja yang tidak merata sepanjang tahun anggaran. Kualitas belanja APBD berkaitan erat dengan prinsip *value for money* yang mencakup ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Mardiasmo (2018) menekankan bahwa belanja publik yang berkualitas disamping diukur dari penyerapan anggarannya juga dampak belanja terhadap pencapaian tujuan pembangunan. *Treasury* daerah menjadi simpul penting yang menjembatani perencanaan anggaran dan realisasi belanja.

Etnometodologi yang diperkenalkan oleh Garfinkel (1967) sebagai sudut pandang untuk memahami bagaimana aktor sosial menciptakan keteraturan dalam kesehariannya. Dalam konteks organisasi publik, etnometodologi digunakan untuk mengungkap bagaimana aturan, prosedur, dan sistem dijalankan dapat dimaknai dalam praktik nyata oleh para pelaku dalam organisasi itu. Pengembangan Kamayanti (2022) dalam penggunaan etnometodologi lebih merujuk pada penekanan pentingnya memahami praktik akuntansi dari perspektif pelaku. Etnometodologi akan sangat membantu peneliti menggali “akal sehat organisasi” (*organizational common sense*) yang sering kali tidak tertangkap oleh pendekatan positivistik. Pendekatan etnometodologi sangat relevan digunakan dalam penelitian berkaitan dengan treasury daerah. Fungsi treasury sarat dengan rutinitas, negosiasi, dan interpretasi situasional

Hartandi & Adrison (2022) menunjukkan bahwa keterlambatan dalam pengelolaan APBD

dapat berdampak negatif terhadap pelayanan publik. Hal ini menegaskan bahwa kualitas belanja sangat dipengaruhi oleh aspek waktu (timeliness), selain efektivitas dan efisiensi. Penelitian lain oleh Saputra & Priyastiwi (2026) mengenai kinerja keuangan daerah di Yogyakarta menunjukkan bahwa kualitas belanja berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran secara tepat dan terstruktur. Dengan demikian, kualitas belanja APBD merupakan output dari keseluruhan proses pengelolaan keuangan daerah, termasuk fungsi treasury dan manajemen kas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods dengan desain explanatory sequential, yaitu menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif secara berurutan. Tahap pertama dilakukan melalui pendekatan kuantitatif untuk menguji hubungan antar variabel menggunakan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS). Tahap kedua dilanjutkan dengan pendekatan kualitatif untuk memperdalam dan menjelaskan hasil kuantitatif melalui perspektif etnometodologi. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait optimalisasi fungsi treasury, manajemen kas, likuiditas daerah, dan kualitas belanja APBD.

Lokasi penelitian adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Komplek Kepatihan Utara, Suryatmajan, Kecamatan Danurejan, DIY 55213. Pemilihan lokasi didasarkan pada peran strategis BPKA DIY sebagai pengelola treasury daerah dan pengendali kas APBD DIY.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria responden yang memiliki pemahaman dan keterlibatan langsung dalam proses pengelolaan kas, treasury, dan pelaksanaan anggaran. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 responden yang dianggap representatif untuk analisis SEM-PLS.

Teknik pengumpulan data pada tahap kuantitatif dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator variabel yang mengacu pada literatur terkait, yaitu optimalisasi fungsi treasury, manajemen kas, likuiditas daerah, dan kualitas belanja APBD. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk memastikan kualitas instrumen sebelum digunakan dalam analisis.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnometodologi. Pendekatan ini dipilih untuk memahami praktik sosial dan keteraturan kerja aparatur dalam menjalankan fungsi treasury daerah. Metode etnometodologi digunakan untuk mengkaji bagaimana praktik fungsi treasury daerah dijalankan dalam aktivitas keseharian aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman dan pemaknaan informan terhadap praktik pengelolaan kas daerah. Observasi langsung dilakukan terhadap aktivitas keseharian aparatur dalam pengelolaan arus kas, penjadwalan pembayaran, dan penggunaan sistem keuangan daerah. Studi dokumentasi meliputi penelaahan Standar Operasional Prosedur (SOP), laporan kas, serta dokumen APBD dan realisasi anggaran.

Analisis data dilakukan secara simultan sejak pengumpulan data. Tahapan analisis meliputi reduksi data, koding tema yang mencakup perencanaan kas, pelaksanaan kas, dan pengendalian kas, serta analisis tematik untuk mengidentifikasi pola praktik dan makna yang

dibangun oleh aparatur. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, serta klarifikasi temuan kepada informan. Tahapan penelitian meliputi tahap pra-lapangan, pengumpulan data lapangan, pengolahan dan analisis data, validasi data, serta penarikan kesimpulan dan rekomendasi. Setiap tahapan dilakukan secara sistematis untuk memastikan temuan penelitian mencerminkan praktik nyata fungsi treasury daerah.

Informan penelitian ditentukan secara purposive, yaitu aparatur yang terlibat langsung dalam pengelolaan treasury daerah. Informan penelitian meliputi Kepala Bidang Perbendaharaan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, serta Operator SIPD dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Informan dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik treasury daerah dari berbagai peran dan fungsi.

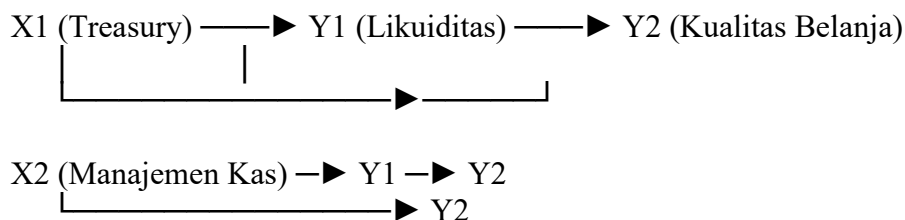
Teknik analisis data kuantitatif menggunakan SEM-PLS dengan bantuan software SmartPLS. Analisis dilakukan melalui dua tahap, yaitu pengujian outer model untuk menilai validitas dan reliabilitas konstruk, serta pengujian inner model untuk menguji hubungan antar variabel dan hipotesis penelitian. Indikator yang digunakan meliputi loading factor, Average Variance Extracted (AVE), Composite Reliability, Cronbach's Alpha, R-Square (R^2), Q-Square (Q^2), serta effect size (f^2).

Analisis data kualitatif dilakukan dengan mengacu pada tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara dianalisis secara interpretatif untuk mengidentifikasi pola praktik sosial dalam pengelolaan treasury daerah. Pendekatan etnometodologi digunakan untuk menggali bagaimana aparatur membangun keteraturan kerja melalui tindakan rutin, praktik informal, serta interpretasi terhadap aturan formal.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu optimalisasi fungsi treasury (X1) dan manajemen kas (X2), variabel mediasi yaitu likuiditas daerah (Y1), serta variabel dependen yaitu kualitas belanja APBD (Y2). Definisi operasional masing-masing variabel disusun berdasarkan indikator yang terukur sehingga dapat dianalisis secara kuantitatif.

Dengan menggunakan pendekatan mixed methods, penelitian ini tidak hanya menguji hubungan antar variabel secara statistik, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam mengenai praktik treasury daerah dalam konteks nyata. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih komprehensif serta relevan dalam penguatan pengelolaan keuangan daerah.

Optimalisasi fungsi treasury (X1) dan manajemen kas (X2) memengaruhi likuiditas (Y1) dan kualitas belanja (Y2). Likuiditas juga berperan sebagai mediator yang menyalurkan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y2.



Desain

Pendekatan mixed methods dengan desain explanatory sequential: tahap kuantitatif diikuti pendalaman kualitatif.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah pengelola keuangan daerah pada BPKAD dan OPD di DIY. Sampel ditentukan dengan purposive sampling dengan kriteria:

1. terlibat langsung dalam pengelolaan kas/belanja,
2. pengalaman ≥ 1 tahun,
3. terlibat dalam realisasi APBD.

Jumlah sampel 60 responden, memadai untuk analisis SEM-PLS.

Pengumpulan Data

1. Kuantitatif: kuesioner skala Likert 1–5
2. Kualitatif: wawancara mendalam pada informan kunci

Analisis Data

Menggunakan SEM-PLS (SmartPLS):

1. Outer model: validitas (loading $> 0,7$; AVE $> 0,5$) dan reliabilitas (CR, $\alpha > 0,7$)
2. Inner model: koefisien jalur, R^2 , signifikansi (t-statistik $> 1,96$)
3. Uji mediasi: bootstrapping (pengaruh tidak langsung)

Hipotesis Penelitian

H1: Optimalisasi fungsi treasury berpengaruh positif terhadap likuiditas daerah

H2: Manajemen kas berpengaruh positif terhadap likuiditas daerah

H3: Likuiditas daerah berpengaruh positif terhadap kualitas belanja APBD

H4: Optimalisasi fungsi treasury berpengaruh terhadap kualitas belanja APBD

H5: Manajemen kas berpengaruh terhadap kualitas belanja APBD

1. Optimalisasi Fungsi Treasury dan Likuiditas

Fungsi treasury yang optimal meningkatkan akurasi perencanaan kas dan pengendalian arus kas, sehingga memperkuat likuiditas daerah.

H1: Optimalisasi fungsi treasury daerah berpengaruh positif terhadap likuiditas daerah.

2. Manajemen Kas dan Likuiditas

Manajemen kas yang efektif memastikan ketersediaan dana dan meminimalkan mismatch kas.

H2: Manajemen kas daerah berpengaruh positif terhadap likuiditas daerah.

3. Likuiditas dan Kualitas Belanja

Likuiditas yang memadai memungkinkan realisasi belanja tepat waktu dan efisien.

H3: Likuiditas daerah berpengaruh positif terhadap kualitas belanja APBD.

4. Pengaruh Langsung terhadap Kualitas Belanja

Selain melalui likuiditas, treasury dan manajemen kas dapat memengaruhi kualitas belanja secara langsung.

H4: Optimalisasi fungsi treasury daerah berpengaruh positif terhadap kualitas belanja APBD.

H5: Manajemen kas daerah berpengaruh positif terhadap kualitas belanja APBD.

5. Peran Mediasi Likuiditas

Likuiditas menjadi mekanisme transmisi pengaruh treasury dan manajemen kas terhadap kualitas belanja.

H6: Likuiditas daerah memediasi pengaruh optimalisasi fungsi treasury terhadap kualitas belanja APBD.

H7: Likuiditas daerah memediasi pengaruh manajemen kas terhadap kualitas belanja APBD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis kuantitatif dengan menggunakan SEM-PLS juga temuan kualitatif melalui pendekatan etnometodologi. Proses ini menjelaskan hubungan antar variabel secara statistik, juga memahami praktik nyata pengelolaan treasury di lingkungan BPKA DIY.

1. Analisis Kuantitatif (SEM-PLS)

a. Hasil Uji Hipotesis

Tabel 1. Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Hubungan	Koefisien	T-Statistik	P-Value	Keputusan
H1	Treasury → Likuiditas	0,432	3,215	0,001	Diterima
H2	Manajemen Kas → Likuiditas	0,389	2,987	0,003	Diterima
H3	Likuiditas → Kualitas Belanja	0,521	4,102	0,000	Diterima
H4	Treasury → Kualitas Belanja	0,178	1,654	0,098	Ditolak
H5	Manajemen Kas → Kualitas Belanja	0,205	1,732	0,084	Ditolak

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Tabel di atas, terlihat bahwa pengaruh terbesar terdapat pada hubungan likuiditas terhadap kualitas belanja APBD (0,521). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas belanja sangat ditentukan oleh kondisi likuiditas daerah. Fungsi treasury (0,432) dan manajemen kas (0,389) terbukti signifikan terhadap likuiditas, namun tidak berpengaruh langsung terhadap kualitas belanja. Ini menegaskan adanya peran mediasi likuiditas.

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 2. Koefisien Determinasi (R^2)

Variabel	R^2	Interpretasi
Likuiditas	0,612	61,2% dijelaskan treasury & kas
Kualitas Belanja	0,684	68,4% dijelaskan model

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Artinya model memiliki kekuatan penjelas yang cukup baik.

c. Effect Size (f^2)

Tabel 3. Effect Size (f^2)

Hubungan	f^2	Kategori
Likuiditas → Kualitas Belanja	0,356	Besar
Treasury → Likuiditas	0,221	Sedang
Manajemen Kas → Likuiditas	0,187	Sedang

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Likuiditas terbukti sebagai variabel dominan dalam model.

Interpretasi Kuantitatif menunjukkan bahwa: Treasury dan manajemen kas = input system; Likuiditas = mekanisme kunci; Kualitas belanja = output. Kualitas belanja tidak dipengaruhi langsung oleh sistem, tetapi oleh kemampuan menjaga likuiditas

Pendekatan etnometodologi digunakan untuk memahami “bagaimana” praktik treasury dijalankan dalam realitas sehari-hari. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan

likuiditas tidak hanya mengikuti sistem formal, tetapi juga melibatkan praktik sosial, interpretasi, dan strategi adaptif aparatur. Temuan Wawancara Informan

Informan 1:

“Kadang realisasi belanja tidak bisa langsung karena dana masuknya tidak sesuai jadwal, jadi kami harus atur ulang pembayaran.” Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian situasional (indexicality)

Informan 2:

“Kami prioritaskan belanja yang sifatnya mendesak seperti gaji dan layanan publik.” Hal ini menunjukkan praktik prioritas informal dalam treasury

Informan 3:

“Walaupun sistem sudah ada, tetap perlu koordinasi antar bidang.” Menunjukkan treasury sebagai praktik sosial, bukan sekadar sistem

Informan 4:

“Keterlambatan transfer pusat sangat mempengaruhi kas daerah.” Hal ini menunjukkan faktor eksternal memicu adaptasi internal

Informan 5:

“Kadang kita harus menahan pembayaran dulu supaya kas tetap aman.” Hal ini menunjukkan strategi menjaga likuiditas secara praktis

Informan 6:

“Kami rutin memantau posisi kas harian sebelum menyetujui pembayaran.” Hal ini praktik reflexivity (kesadaran tindakan)

Informan 7:

“Koordinasi dengan OPD penting supaya tidak terjadi penumpukan belanja.” Hal ini upaya menghindari year-end spending spike

Informan 8:

“Sistem membantu, tapi keputusan tetap di tangan pengelola kas.” Hal ini peran manusia lebih dominan dari sistem

Informan 9:

“Kadang aturan tidak menjelaskan kondisi tertentu, jadi kami pakai pengalaman.” Hal ini praktik berbasis tacit knowledge.

Informan 10:

“Yang penting kas aman dulu, baru belanja bisa lancar.” Hal ini likuiditas sebagai prioritas utama

Interpretasi Etnometodologi menunjukkan bahwa:

- Indexicality → keputusan tergantung situasi
- Reflexivity → tindakan didasarkan pada evaluasi kondisi kas
- Practical reasoning → pengalaman lebih dominan dari aturan formal
- Treasury dijalankan melalui praktik rutin dan pengalaman
- Aparatur melakukan interpretasi terhadap aturan
- Keputusan bersifat situasional dan kontekstual

Penelitian ini menegaskan bahwa:

- Treasury dan manajemen kas meningkatkan likuiditas
- Likuiditas meningkatkan kualitas belanja
- Likuiditas dijaga melalui praktik sosial aparatur

Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah bukan hanya sistem teknis, tetapi juga praktik sosial yang adaptif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Fungsi treasury daerah dan manajemen kas terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin optimal pengelolaan treasury dan kas, maka kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan dana jangka pendek semakin baik.
2. Likuiditas keuangan daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas belanja APBD. Dengan kata lain, kualitas belanja daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam menjaga kestabilan arus kas, sehingga belanja dapat direalisasikan secara tepat waktu, efisien, dan sesuai prioritas.
3. Fungsi treasury dan manajemen kas tidak berpengaruh langsung secara signifikan terhadap kualitas belanja. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh kedua variabel tersebut bersifat tidak langsung, yaitu melalui peran mediasi likuiditas.
4. Likuiditas berperan sebagai variabel kunci (mediator utama) dalam hubungan antara fungsi treasury, manajemen kas, dan kualitas belanja. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh sistem dan prosedur, tetapi oleh efektivitas dalam menjaga likuiditas.
5. Berdasarkan pendekatan etnometodologi, praktik pengelolaan treasury di lapangan tidak sepenuhnya bersifat teknis dan formal, melainkan juga dipengaruhi oleh interpretasi, pengalaman, dan strategi adaptif aparatur. Pengambilan keputusan dalam menjaga likuiditas sering kali dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi kas harian, prioritas belanja, serta ketidakpastian transfer dana.
6. Temuan kualitatif mengungkap bahwa aparatur secara aktif melakukan penyesuaian (indexicality), refleksi atas kondisi keuangan (reflexivity), serta menggunakan pengetahuan praktis (practical reasoning) dalam mengelola kas daerah. Hal ini memperkuat hasil kuantitatif bahwa likuiditas bukan hanya variabel teknis, tetapi juga hasil dari praktik sosial dalam organisasi.
7. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi fungsi treasury daerah dalam menjaga likuiditas merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas belanja APBD. Integrasi antara sistem yang baik dan praktik pengelolaan yang adaptif menjadi faktor penentu keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.

REKOMENDASI

1. Penguatan kapasitas SDM treasury daerah.
2. Penyempurnaan SOP berbasis praktik nyata.
3. Integrasi sistem digital yang lebih adaptif.
4. Berita BPKA DIY terkait penyelesaian masalah simpanan nasabah BUKP bisa dipakai untuk merekomendasikan peningkatan kapasitas BPKA DIY dalam menangani risiko likuiditas yang berdampak public
5. Penyusunan regulasi internal terkait manajemen idle cash daerah.
6. Penguatan fungsi pengendalian intern atas pengelolaan kas.
7. Penelitian lanjutan dapat mengembangkan model kualitatif yang lebih kompleks atau studi komparatif antar daerah.
8. Pemerintah Daerah DIY perlu memperkuat cash forecasting berbasis kegiatan dan risiko.
9. Optimalisasi peran BPKA/BPKAD sebagai treasury manager daerah, bukan sekadar administrator kas.

10. Peningkatan koordinasi dan komitmen OPD dalam menyusun rencana penarikan dana yang realistis.
11. Pemanfaatan sistem informasi keuangan terintegrasi untuk monitoring kas secara real-time.

Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi teoritis: memperkuat peran likuiditas sebagai mediator
2. Kontribusi praktis: dasar penguatan fungsi treasury daerah
3. “Penelitian ini mengintegrasikan fungsi treasury, manajemen kas, dan kualitas belanja melalui mekanisme likuiditas sebagai variabel mediasi.”
4. “Pendekatan SEM-PLS memungkinkan pengujian hubungan kompleks dengan sampel terbatas.”

DAFTAR REFERENSI

- Allen, R., & Tommasi, D. (2001). *Managing Public Expenditure: A Reference Book for Transition Countries*. OECD Publishing.
- Antara Jogja. (2025, November). *Kanwil DJPb DIY Apresiasi Sinergi BPKA Tingkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. ANTARA News Yogyakarta. <https://jogja.antaranews.com>
- Bastian, I. (2020). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar (Edisi 3)*. Erlangga.
- BPKA DIY. (2025, April 16). *TP2DD DIY Perkuat Kolaborasi dan Inovasi dalam Transformasi Digital Ekosistem Keuangan Daerah*. BPKA DIY Official News. <https://bpka.jogjaprovo.go.id/berita/tp2dd-diy-perkuat-kolaborasi-dan-inovasi-dalam-transformasi-digital-ekosistem-keuangan-daerah>
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2019). *Fundamentals of Financial Management* (15th ed.). Cengage Learning.
- Garfinkel, Harold. (1967). *Studies in ethnomethodology*. Prentice-Hall.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2020). *Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi 4)*. Salemba Empat.
- Hartandi, B. A., & Adrison, V. (2022). Ketepatan Waktu dalam Penetapan APBD oleh Kepala Daerah: Peran Siklus Politik. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 7(3), 271–286. <https://doi.org/10.33105/itrev.v7i3.436>
- Hood, C. (1991). A PUBLIC MANAGEMENT FOR ALL SEASONS? *Public Administration*, 69(1), 3–19. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x>
- Hughes, O. E. (2012). *Public Management and Administration: An Introduction* (4th ed.). Palgrave Macmillan.
- Kamayanti, A. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif akuntansi: Pengantar religiositas keilmuan*. Yayasan Rumah Peneleh.
- Kamayanti, A. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan (Edisi Revisi)*. Peneleh.
- Kanwil DJPb DIY. (2025, November 20). *Tingkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemda dalam GFS, Kanwil DJPb DIY Apresiasi Sinergi dengan BPKA DIY*. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta - Kementerian Keuangan RI. <https://djpbo.kemenkeu.go.id/kanwil/diy/id/data-publikasi/berita-terbaru/4091-tingkatkan-kualitas-laporan-keuangan-pemda-dalam-gfs,-kanwil-djpbo-diy-apresiasi-sinergi-dengan-bpka-diy.html>
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2018). *Intermediate Accounting: IFRS Edition*

- (3rd ed.). John Wiley & Sons.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. 77 (2020). <https://jdih.kemendagri.go.id/>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.07/2020 Tentang Koordinasi Penyelarasan Langkah-Langkah Kebijakan Keuangan Daerah Dalam Rangka Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, Pub. L. No. 62/PMK.07/2020, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2020).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. 12, 1 (2019). <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pp-12-tahun-2019/view>
- Putra, G. A. P., & Shauki, E. R. (2022). Motivasi dan Kendala Percepatan Penyaluran Kas Daerah. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 7(2), 175–191. <https://doi.org/10.33105/itrev.v7i2.488>
- Saputra, M. S., & Priyastiwi, P. (2026). Analisis Rasio Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020–2024. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 14(1), 39–43. <https://doi.org/10.21067/jrma.v14i1.13325>
- Syahrudin. (2026). Strategi Manajemen Kas Daerah dalam Menjaga Likuiditas APBD. *Jurnal Arastirma*, 6(1), 11–24. <https://doi.org/10.32493/jaras.v6i1.58189>
- Van Horne, J. C., & Wachowicz, J. M. (2013). *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan* (13th ed.). Salemba Empat.